

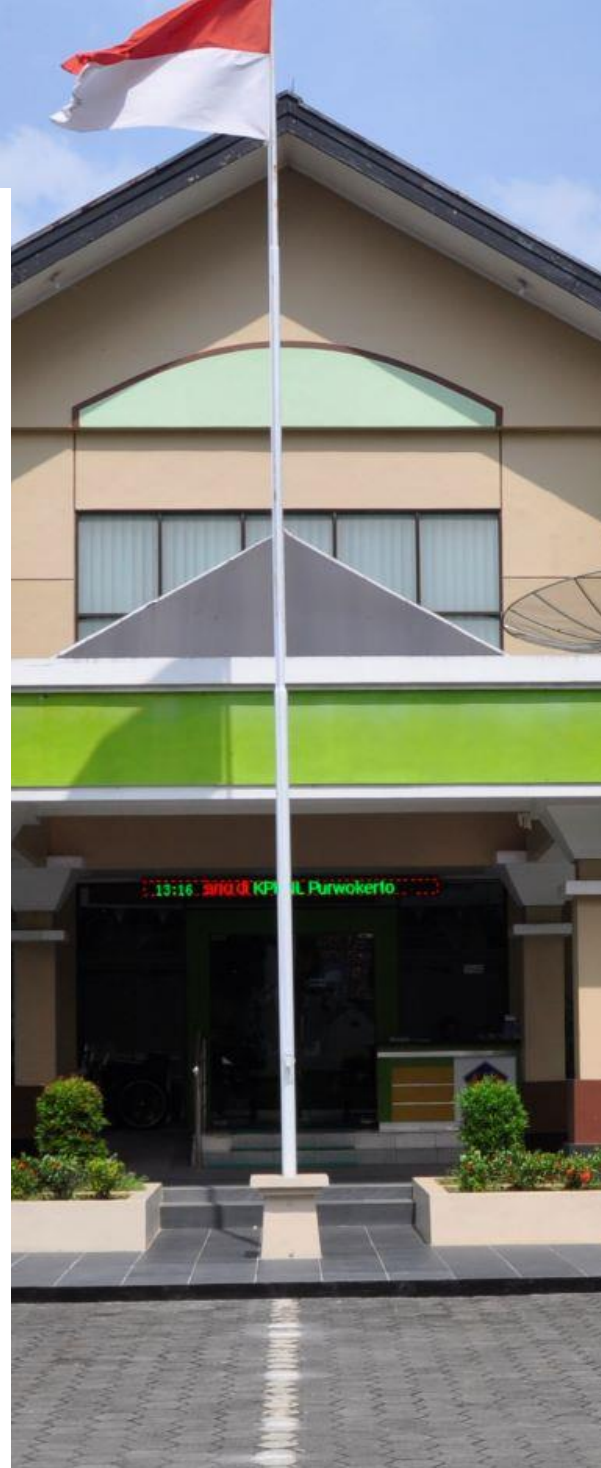
# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 *(AUDITED)*

---

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

## KPKNL PURWOKERTO

Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto



---

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Purwokerto, 07 Mei 2023  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Ali Mahmud



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA**  
**TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO**  
JALAN PAHLAWAN NOMOR 876, PURWOKERTO 53143 TELEPON: (0281) 630454; FAKSIMILE: (0281) 630451; SUREL:  
KPKNLPURWOKERTO@KEMENKEU.GO.ID

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahunan 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purwokerto, 07 Mei 2024  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Ali Mahmud

---

## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto Tahunan Tahun 2022 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahunan TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 9.507.702.616,00 atau mencapai 226 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 4.206.081.000,00.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.918.051.848,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp89.020.360,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp30.829.031.448,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp57.749.161,00 dan Rp 30.860.302.687,00.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 9.507.702.616,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 1.936.220.285,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp7.571.482.331,00. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp7.571.482.331,00.

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023

---

adalah sebesar Rp30.929.533.771,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp7.571.482.331,00 kemudian ditambah koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp0,00 dan dikurangi dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.640.713.415,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp30.860.302.687,00.

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Tahun 2023 (Audited) disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 2022

Uraian	Catatan	TA 2023 (Audited)			TA 2022 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	4.206.081.000	9.507.702.616	226	5.576.168.135
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>4.206.081.000</b>	<b>9.507.702.616</b>	<b>226</b>	5.576.168.135
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	0
Belanja Barang	B.4	1.731.835.000	1.614.004.603	93	1.511.354.566
Belanja Modal	B.5	57.845.000	56.325.000	97	169.755.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.789.670.000</b>	<b>1.670.329.603</b>	<b>93</b>	1.681.109.566

Purwokerto, 07 Mei 2024  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Ali Mahmud

## II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO  
**NERACA**  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	43.383.284	68.221.864
Persediaan	C.3	45.637.076	11.870.019
Jumlah Aset Lancar		89.020.360	80.091.883
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.4	24.544.187.000	24.544.187.000
Peralatan dan Mesin	C.5	4.954.591.741	4.832.386.585
Gedung dan Bangunan	C.6	6.935.336.000	6.935.336.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.7	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(5.605.083.253)	(5.376.252.575)
Jumlah Aset Tetap		30.829.031.488	30.935.657.010
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Lain-lain	C.9	158.400.000	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(158.400.000)	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>30.918.051.848</b>	<b>31.015.748.893</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ke tiga	C.11	57.749.161	86.215.122
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.12	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.13	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		57.749.161	86.215.122
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.14	30.860.302.687	30.929.533.771
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>30.860.302.687</b>	<b>30.929.533.771</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>30.918.051.848</b>	<b>31.015.748.893</b>

Purwokerto, 07 Mei 2024  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Ali Mahmud

### III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	9.507.702.616	5.576.168.135
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>9.507.702.616</b>	<b>5.576.168.135</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	51.186.080	115.546.583
Beban Barang dan Jasa	D.4	806.322.179	794.732.580
Beban Pemeliharaan	D.5	352.748.736	362.414.645
Beban Perjalanan Dinas	D.6	366353.170	245.651.144
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	359.610.120	345.644.172
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1.936.220.285</b>	<b>1.863.989.124</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>7.571.482.331</b>	<b>3.712.179.011</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0	0
Surplus/Devisit Dari Kegiatan Operasional Lainnya		0	0
<b>SURPLUS/DEVISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/DEVISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>7.571.482.331</b>	<b>3.712.179.011</b>
<b>SURPLUS/DEVISIT</b>		<b>7.571.482.331</b>	<b>3.712.179.011</b>

Purwokerto, 07 Mei 2024  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Ali Mahmud



## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	30.929.533.771	31.022.155.204
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	7.571.482.331	3.712.179.011
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
SELISIH REVALUASI ASET		0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(7.640.713.415)	(3.804.800.444)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(69.231.084)	(92.621.433)
EKUITAS AKHIR	E.5	30.860.302.687	30.929.533.771

Purwokerto, 07 Mei 2024  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Ali Mahmud

---

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Dasar Hukum

##### *Dasar Hukum*

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual Pada Laporan Keuangan.;

- 
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012 tentang tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang dan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

### **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto**

*KPKNL Purwokerto didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan bmn, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik negara, pengurusan piutang Negara, dan pelayanan lelang. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Entitas berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 876, Purwokerto, Jawa Tengah.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Melalui peran tersebut diharapkan pelayanan di bidang kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada stakeholders dapat ditingkatkan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto berkomitmen dengan visi “menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
- Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
- Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
- Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

*Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 (Audited dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI)*

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 (Audited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dimana kedua modul aplikasi tersebut telah menjadi satu dalam aplikasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

*Dasar Pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah yang bersangkutan.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

*Kebijakan Akuntansi mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

---

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan-LRA

- (1) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- (2) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (3) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b) Pendapatan- LO

- (1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- (2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI adalah sebagai berikut:
  - (a) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan pembeli atas lelang non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I (setoran SSBP menggunakan MAK 425782). Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara.
  - (b) Penerimaan atas kertas sekuriti untuk pembuatan kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas I (setoran SSBP menggunakan MAK 425782). Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke kas negara.
  - (c) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan pembeli atas lelang pegadaian (setoran SSBP menggunakan MAK 425784) Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara.

- 
- (d) Penerimaan atas pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I (setoran SSBP menggunakan MAK 425699) Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara.
  - (e) Penerimaan atas pemberian ijin operasional Balai Lelang (setoran SSBP menggunakan MAK 425699). Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara.
  - (f) Penerimaan atas perpanjangan masa jabatan Pejabat Lelang Kelas I (setoran SSBP menggunakan MAK 425699). Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara.
  - (g) Penerimaan Denda keterlambatan penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas I (setoran SSBP menggunakan MAK 425699). Pendapatan diakui ketika diketahui Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas I terlambat menyetorkan Bea Lelang ke Kas Negara. Hal ini diketahui setelah dilakukan verifikasi laporan Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas I oleh Kanwil DJKN.
  - (h) Penerimaan Bea Lelang batal atas permintaan penjual (setoran SSBP menggunakan MAK 425699). Pendapatan diakui pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan dari penjual oleh Kepala KPKNL dan disetorkan ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL.
  - (i) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli (setoran SSBP menggunakan MAK 425699) atas lelang eksekusi, non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Lelang Kayu hasil hutan lainnya dari tangan pertama. Pendapatan diakui ketika pembeli melunasi pembayaran Pokok Lelang ke rekening penampungan lelang KPKNL.
  - (j) Penerimaan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara oleh Penanggung Hutang. (setoran SSBP menggunakan MAK 425785). Pendapatan diakui ketika telah pastinya pembayaran angsuran atau penarikan yang diindikasikan oleh telah diterimanya pembayaran oleh Bendahara Penerima dan telah masuk ke Rekening penampungan piutang dan telah terverifikasi.
  - (k) Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari pembeli wanprestasi (setoran SSBP menggunakan MAK 425699). Pendapatan diakui saat ditetapkannya pembeli lelang wanprestasi oleh Pejabat Lelang.

- 
- (l) Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang yang tidak diambil (setoran SSBP menggunakan MAK 425699). Pendapatan diakui 6 bulan setelah upaya pemberitahuan melalui surat panggilan/ pengumuman melalui surat kabar harian kepada pemilik atau Penanggung Hutang dan/ atau Penjamin Hutang (setoran SSBP menggunakan MAK 425699). Pendapatan diakui setelah 3 kali dipanggil secara patut tidak bersedia mengambil uang kelebihan hasil lelang atau telah dipanggil melalui surat kabar harian dan telah disetor ke Kas Negara.
  - (m) Penerimaan Pemohon lelang tidak bersedia mengambil/ mencairkan cek/ BG (setoran SSBP menggunakan MAK 425699). Pendapatan diakui saat pemberitahuan tertulis telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dan telah disetor ke Kas Negara.
  - (n) Penerimaan atas penyeteroran piutang negara yang tidak jelas (setoran SSBP menggunakan MAK 425699). Pendapatan diakui setelah proses verifikasi dan konfirmasi dilakukan paling lama 6 bulan sejak penerimaan tersebut masuk ke rekening penampungan piutang dan telah disetor ke Kas Negara.
  - (o) Pendapatan sewa Gedung (rumah negara) diakui setelah diterbitkannya surat ijin menempati rumah negara oleh Kepala Kantor.
  - (p) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - (q) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- c) Belanja
- (1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
  - (2) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
  - (3) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- 
- (4) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d) **Beban**
- (1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- (2) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (3) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e) **Aset**
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- (1) **Aset Lancar**
- (a) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- (b) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- (c) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- (i) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (ii) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- (d) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas

piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- (e) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- (f) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - (i) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
  - (ii) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - (iii) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- (2) Aset Tetap
  - (a) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
  - (b) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- 
- (c) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- (i) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - (ii) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - (iii) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- (d) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- (e) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- (3) Penyusutan Aset Tetap
- (a) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
  - (b) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
    - (i) Tanah;
    - (ii) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
    - (iii) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
  - (c) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- (d) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- (e) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

- (4) Piutang Jangka Panjang
- (a) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- (b) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- (5) Aset Lainnya
- (a) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- (b) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- (c) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- (d) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa

Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- (e) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- (6) Kewajiban
- (a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- (b) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- (i) Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- (ii) Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setel Revisi
<b>Pendapatan</b>		
(425782) Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	7.887.787.991	7.887.78
(425784) Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.558.231.612	1.558.23
(425782) Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	59.034.562	59.03
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>9.505.054.085</b>	<b>9.505.05</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	-	
Belanja Barang	1.731.825.000	1.731.82
Belanja Bantuan Sosial	-	
Belanja Modal	57.845.000	57.84
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.789.670.000</b>	<b>1.789.67</b>

### B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.507.702.616,00 atau mencapai 226,05 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.206.081.000,00. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto terdiri dari Pendapatan Jasa, dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% R Ang
(425122) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	26.000.000	0	0%
(425129) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	7.000.000	0	0%
(425122) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.000.000	0	0%
(425782) Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	3.282.000.000	7.887.787.991	240.3
(425784) Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	888.000.000	1.558.231.612	175.4
(425785) Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	81.000	59.034.562	72882.
(425699) Pendapatan Jasa Lainnya		1.904.277	0%
(425999) Pendapatan Anggaran Lain-lain		659.021	0%
(425995) Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil		85.233	0%
<b>Jumlah</b>	<b>4.206.081.000</b>	<b>9.507.702.616</b>	<b>226.0</b>

Secara keseluruhan Realisasi Pendapatan Tahunan TA 2023 mengalami kenaikan 70,506% dibanding Tahunan TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan TA 2023 dan Tahunan 2022*

Uraian	Realisasi Tahunan TA 2023	Realisasi Tahunan TA 2022	% N. (TUR
(425782) Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	7.887.787.911	4.102.986.648	92,2
(425784) Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.558.231.612	1.445.105.884	7,82
(425785) Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	59.034.562	16.209.178	264,2
(425699) Pendapatan Jasa Lainnya	1.904.277	8.581.400	-77,8
(425122) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0%
(425911) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0%
(425995) Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	85.233	1.295	6481,6
(425131) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0%
(425999) Pendapatan Anggaran Lain-lain	659.021	3.283.730	-79,9
<b>Jumlah</b>	<b>9.507.702.616</b>	<b>5.576.168.135</b>	<b>70,50</b>

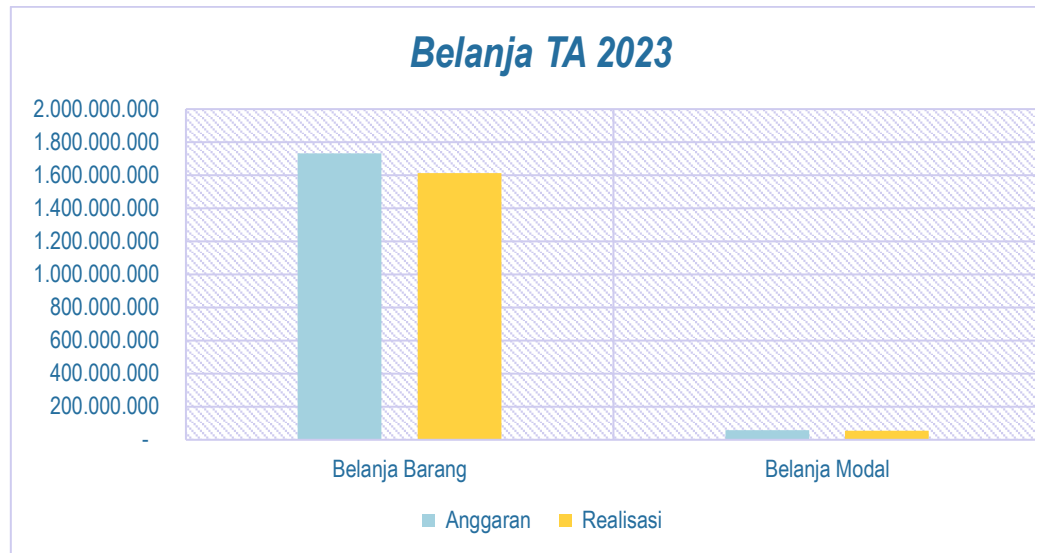
## B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahunan TA 2023 adalah sebesar Rp1.670.329.603,00 atau 93,33% dari anggaran belanja sebesar Rp1.789.670.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan TA 2023 adalah sebagai berikut:

### *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan TA 2023*

Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2022	
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	1.731.825.000	1.614.004.603	93
Belanja Modal	57.845.000	56.325.000	97
<b>Jumlah</b>	<b>1.789.670.000</b>	<b>1.670.329.603</b>	<b>93</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Realisasi Tahunan TA 2022, Realisasi Belanja Tahunan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 0,641%. Hal ini antara lain disebabkan tidak terdapat tambahan pagu dan realisasi belanja Modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan TA 2023 dan Tahunan TA 2022*

Uraian	Realisasi Tahunan TA 2023	Realisasi Tahunan TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	0	0%
Belanja Barang	1.614.004.603	1.511.354.566	6,792%
Belanja Modal	56.325.000	169.755.000	(66,820%)
<b>Jumlah</b>	<b>1.670.329.603</b>	<b>1.681.109.566</b>	<b>(0,641%)</b>

### **B.3. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Tahunan TA 2023 dan Tahunan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai Tahunan TA 2023 mengalami penurunan disbanding Tahunan TA 2021 dikarenakan pada TA 2021 KPKNL Purwokerto tidak terdapat anggaran belanja pegawai.

*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahunan TA 2023 dan Tahunan TA 2022*

Uraian	Realisasi Tahunan TA 2023	Realisasi Tahunan TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	0	0%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0%
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**B.4. Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Tahunan TA 2023 dan Tahunan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.614.004.603,00 dan Rp1.511.354.566. Realisasi Belanja Barang Tahunan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 0,641 % di banding Realisasi Belanja Barang Tahunan TA 2022 karena adanya pengurangan anggaran dalam belanja barang sehingga dilakukan penghematan terutama dalam belanja perjalanan dinas.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahunan TA 2023 dan Tahunan TA 2022*

Uraian	Realisasi Tahunan TA 2023	Realisasi Tahunan TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	611.668.538	634.278.159	(3,565%)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	22.736.995	6.827.500	233,021%
Belanja Barang Persediaan (5218)	84.953.137	114.666.020	(25,913%)
Belanja Jasa (5221)	175.544.037	147.517.098	18,999%
Belanja Pemeliharaan (5231)	352.748.736	362.414.645	(2,667%)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	366.353.170	245.651.144	49,136%
Jumlah Belanja Kotor	1.614.004.603	1.511.354.566	6,792%
Pengembalian Belanja	0	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>1.614.004.603</b>	<b>1.511.354.566</b>	<b>6,792%</b>

**B.5. Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal Tahunan TA 2023 dan Tahunan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp56.325.000,00 dan Rp169.755.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahunan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 66,820% dibanding Tahunan TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahunan TA 2023 dan Tahunan TA 2022*

Uraian	Realisasi Tahunan TA 2023	Realisasi Tahunan TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	169.755.000	(100%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.325.000	0	100%
Jumlah Belanja Kotor	56.325.000	169.755.000	(66,820%)
Pengembalian	0	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>56.325.000</b>	<b>169.755.000</b>	<b>(66,820%)</b>

### B.5.1 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahunan TA 2023 adalah sebesar Rp0,00 mengalami Penurunan bila dibandingkan dengan Tahunan TA 2022. Hal ini disebabkan karena pada TA 2023 tidak terdapat tambahan Pagu Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan seperti di TA 2022. Berikut perbandingan detail realisasi belanja modal Tahunan TA 2023 dengan 2022.

Uraian	Realisasi Tahunan TA 2023	Realisasi Tahunan TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	169.755.000	(100%)
Jumlah Belanja Kotor	0	169.755.000	(100%)
Pengembalian	0	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>169.755.000</b>	<b>(100%)</b>

### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp56.325.000,00 mengalami Kenaikan bila dibandingkan dengan Tahunan TA 2022.

Hal ini disebabkan karena pada TA 2023 terdapat Alokasi Pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin seperti di TA 2022. Berikut perbandingan detail realisasi belanja modal Tahunan TA 2023 dengan 2022.

Uraian	Realisasi Tahunan TA 2023	Realisasi Tahunan TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
AC Split 2PK	37.750.000	0	100%
AC Standing 3 PK	16.275.000	0	100%
Dispenser Air Minum	2.300.000	0	100%
Jumlah Belanja Kotor	56.325.000	0	100%
Pengembalian	0	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>56.325.000</b>	<b>169.755.000</b>	<b>100%</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang sudah dipertanggung-jawabkan atau sudah disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

Keterangan	31 Des 2023	31 Des 2022
Saldo UP	0	0
Kuitansi UP Belum di SPM-kan	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp43.383.284,00 dan Rp68.221.864,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara penerimaan yang bukan berasal dari

UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

Keterangan	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	43.383.264	68.221.864
<b>Jumlah</b>	<b>43.383.264</b>	<b>68.221.864</b>

**C.3. Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp45.637.076,00 dan Rp11.870.019,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan*

Keterangan	31 Des 2023	31 Des 2022
Barang Konsumsi	45.637.076	11.870.019
<b>Jumlah</b>	<b>45.637.076</b>	<b>11.870.019</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Tidak terdapat barang konsumsi yang berada dalam kondisi rusak.

**C.4. Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp24.544.187.000,00 dan Rp24.544.187.000,00.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan*

No	Luas	Lokasi	Nilai
----	------	--------	-------

1	4777 m2	Jl. Pahlawan No 876, Tanjung, Purwokerto Selatan, Jawa Tengah	22.112.969.000
2	1200 m2	Jl. Pahlawan Gang X, Tanjung, Purwokerto Selatan, Jawa Tengah	2.431.218.000
<b>Jumlah</b>			<b>24.544.187.000</b>

### C.5. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin  
senilai  
Rp4.954.591.741,00*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp4.954.591.741,00 dan Rp4.832.386.585,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>4.832.386.585</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	56.325.000
Transfer masuk	224.280.156
Reklas Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Reklas Keluar	0
Penghentian dari penggunaan	(158.400.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>4.954.591.741</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(4.576.032.912)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>378.558.829</b>

### C.6. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan senilai  
Rp6.935.336.000,00*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah Rp6.935.336.000,00 dan 31 Desember 2022 adalah Rp6.935.336.000,00, tidak terdapat penambahan atau pengurangan nilai aset gedung dan bangunan pada tahun 2023.

### C.7. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

### C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp5.605.083.253,00 dan Rp5.376.252.575,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.954.591.741	4.576.032.912	378.558.829
2	Gedung dan Bangunan	6.935.336.000	1.029.050.341	5.906.285.659
<b>Jumlah</b>		<b>11.767.722.585</b>	<b>5.605.083.253</b>	<b>6.284.844.488</b>

### **C.9. Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp158.400.000,00,- dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

### **C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp158.400.000,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

### **C.11. Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp57.749.161,00 dan Rp86.215.122,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

### C.12. Uang Muka dari KPPN

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan merupakan Uang Persediaan (UP) atau tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

### C.13. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp30.860.302.687,00 dan Rp30.929.533.771,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNPB  
Rp9.507.702.616,00*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp9.507.702.616,00 dan Rp5.576.168.135,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 (Audited) dan Tahun 2022*

Uraian	Tahunan TA 2023	Tahunan TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Lainnya	1.904.277	8.581.400	(77,809%)
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	7.887.787.911	4.102.986.648	92,245%
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.558.231.612	1.445.105.884	7,828%
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	59.034.562	16.209.178	264,205%
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	85.233	1.295	6.482,699%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	0%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	0%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	659.021	3.283.730	(79,931%)

<b>Jumlah</b>	<b>9.507.702.616</b>	<b>5.576.168.135</b>	<b>(70,506%)</b>
---------------	----------------------	----------------------	------------------

Pendapatan Jasa berasal dari bea lelang, biaya pengurusan piutang dan lelang negara, bea lelang pegadaian dan jasa lainnya. Sedangkan Pendapatan Lain-lain berasal dari pendapatan anggaran lain-lain. Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan Tahun 2023 (Audited) mengalami kenaikan sebesar 70,506% dari Tahunan Tahun 2022 hal ini dikarenakan adanya kenaikan pendapatan pada Pendapatan Jasa berasal dari bea lelang Pejabat Lelang Kelas I dan bea lelang pegadaian serta Pendapatan Jasa Lainnya.

## D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai  
Rp0,00*

Jumlah Beban Pegawai pada Tahunan Tahun 2023 (Audited) dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat beban pegawai pada TA 2023 karena anggaran belanja pegawai terpusat di Satker Kantor Pusat DJKN.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### *Rincian Beban Pegawai Tahunan Tahun 2023 (Audited) dan Tahun 2022*

<b>Uraian</b>	<b>Tahunan TA 2023</b>	<b>Tahunan TA 2022</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0%
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0%
Beban Tunj. Anak PNS	0	0	0%
Beban Tunj. Struktural PNS	0	0	0%
Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0%
Beban Tunj. PPh PNS	0	0	0%
Beban Tunj. Beras PNS	0	0	0%
Beban Uang Makan PNS	0	0	0%
Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0%

Beban Uang Lembur	0	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahunan Tahun 2023 (Audited) dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp51.186.080,00 dan Rp115.546.583,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahunan TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Beban Persediaan Tahunan Tahun 2023 (Audited) dan Tahun 2022*

Uraian	Tahunan TA 2023	Tahunan TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	Rp51.186.080,00	Rp115.546.583,00	(55,701%)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp51.186.080,00</b>	<b>Rp115.546.583,00</b>	<b>(55,701%)</b>

### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa  
Rp806.322.179,00*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahunan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp806.322.179,00 dan Rp794.732.580,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahunan TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan Tahun 2023 (Audited) dan Tahun 2022*

Uraian	Tahunan TA 2023	Tahunan TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	399.474.138	397.095.530	0,599%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	34.731.900	44.943.950	(22,722%)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	133.236.000	147.686.000	(9,784%)
Beban Barang Operasional Lainnya	39.573.800	41.400.000	(4,411%)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	781.200	7.024.179	(88,878%)
Beban Bahan	17.496.985	6.500.000	169,184%

Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.240.000	327.500	1.500%
Beban Langganan Listrik	149.801.479	128.723.568	16,375%
Beban Langganan Telepon	19.835.107	20.262.603	(2,110%)
Beban Langganan Air	4.551.570	669.250	580,100%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	0	100.000	(100%)
Beban Sewa	1.600.000	0	100%
<b>Jumlah</b>	<b>806.322.179</b>	<b>794.732.580</b>	<b>1,458%</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan  
Rp352.748.736,00*

Beban Pemeliharaan Tahunan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp352.748.736,00 dan Rp362.414.645,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahunan TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan Tahun 2023 (Audited) dan Tahun 2022*

Uraian	Tahunan TA 2023	Tahunan TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	170.868.753	172.665.858	(1,041%)
Beban Peralatan dan Mesin	181.879.983	189.748.787	(4,147%)
<b>Jumlah</b>	<b>352.748.736</b>	<b>362.414.645</b>	<b>(2.667%)</b>

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas  
Rp366.353.170,00*

Beban Perjalanan Dinas Tahunan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp366.353.170,00 dan Rp245.651.144,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahunan TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan Tahun 2023 (Audited) dan Tahun 2022*

Uraian	Tahunan TA 2023	Tahunan TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	337.775.170	219.731.144	53,722%

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.578.000	25.920.000	10,255%
<b>Jumlah</b>	<b>366.353.170</b>	<b>245.651.144</b>	<b>49,136%</b>

#### D.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan & Amortisasi  
Rp359.610.120,00*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahunan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp359.610.120,00 dan Rp345.644.172,00

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahunan TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan Tahun 2023 (Audited) dan Tahun 2022*

Uraian	Tahunan TA 2023	Tahunan TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	199.696.566	187.906.964	6,274%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	159.913.554	157.737.208	1,380%
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>359.610.120</b>	<b>345.644.172</b>	<b>4,041%</b>

#### D.5. Kegiatan Non Operasional

*Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp0,00*

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahunan TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahunan TA 2023	Tahunan TA 2022	NAIK (TURUN)
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0%
Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0%
Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0%
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

---

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal*  
*Rp30.929.533.771,00*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp30.929.533.771,00 dan 31.022.155.204,00.

### E.2. Surplus (Defisit) LO

*Surplus/Defisit LO*  
*Rp7.640.713.415,00*

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp7.640.713.415,00 dan Rp3.712.179.011,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

*Koreksi Rp0,00*

Terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

### E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar Entitas*  
*(Rp7.640.713.415,00)*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp7.640.713.415,00) dan (Rp3.804.800.444,00). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

### E.4. Ekuitas Akhir

*Nilai Ekuitas*  
*Rp30.860.302.687,00*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp30.860.302.687,00 dan Rp30.929.533.771,00

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

### F.2. Pengungkapan Lain-Lain

---

Kondisi Pandemi Covid-19 mulai awal Semester II 2023 sudah mulai mereda/selesai, sehingga kegiatan operasional dan non operasional pada luar ruangan/pertemuan fisik meningkat. Sehingga pencapaian output pada TA 2023 yang sebelumnya progressnya terhambat karena kegiatan fisik menurun, maka mulai Semester II TA 2022 progressnya cukup meningkat.